

Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-isu Gender

Diah Wulandari

Abstract

Mass media has become one of the essential elements in the distribution of information relating to women's rights and gender justice. Through publicity and coverage on various issues of women, mass media can influence the way readers view the perspective of women and gender sensitive or, even conversely, the more gender bias. This research was conducted with three objectives: (1) to determine her political news on gender issues such as what is included in the five themes of political news in Kompas, (2) to understand the dominant ideology of capitalist patriarchy in the construction of political news with gender issues in Kompas, and (3) to label capitalistic patriarchal ideology that is used by Kompas in constructing the political news with gender issues. The study shows that patriarchy ideology arises two framing concepts political masculinity and woman marginalization in political news.

Keywords : *politics, gender, mass media*

Pendahuluan

Isu sensitivitas gender di media massa memiliki kompleksitas tersendiri. Indonesia, sebagaimana layaknya negara dunia ketiga lainnya, masih menganggap gender sebagai konsep baru. Konsep gender masih harus melakukan beberapa adaptasi terhadap sistem nilai setempat agar dapat diterima secara luas. Pengelola media yang lebih banyak laki-laki akan menghasilkan produk yang cenderung berpihak pada kepentingan laki-laki, dan meskipun ada liputan tentang perempuan, maka tendensi yang muncul sarat dengan kepentingan komersial semata. Media secara tidak sadar seringkali juga membuat relasi-relasi tertentu yang bias gender, seperti menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang lemah, dan membuat konstruksi kebenaran yang diproduksi oleh laki-laki. Paradoks terjadi ketika berita yang dihasilkan menjadi bias gender. Sementara media massa mempunyai peran signifikan untuk menanamkan ideologi gender di tengah stereotipe tentang gender yang berlaku di masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Dr. Daniel Dhakidae, yang mengatakan bahwa pers, terutama

suratkabar harian, sebagai sosok yang *male industry*, suatu industri yang didominasi oleh kaum laki-laki dari segi kuantitas (personalia) maupun kualitas (struktur organisasi dan manajemen kerja). Hasil penelitian terhadap sembilan suratkabar harian besar yang terbit di Jawa pada tahun 1998, menunjukkan bahwa jumlah jurnalis perempuan hanya berkisar antara 6 sampai 16 persen dengan rata-rata per suratkabar 10 persen (Siregar, 1999: 14). Bahkan pada tahun 2002 keanggotaan PWI terdiri dari 461 orang jurnalis perempuan dan 4.687 orang jurnalis laki-laki (May Lan, 2002: 11).

Kompas, sebagai harian terbesar dan berpengaruh di Indonesia juga tak lepas dari fenomena tersebut. Hasil penelitian dari T. Titi Widaningsih menunjukkan bahwa pada tahun 1999, jumlah jurnalis perempuan di *Kompas* tidak mencapai 20 persen dari keseluruhan jumlah jurnalis yang ada. Bahkan dari keseluruhan jumlah pimpinan redaksi, jumlah perempuan yang duduk didalamnya kurang dari 15 persen (Widaningsih, 1999: 33). Bahkan data terbaru menunjukkan bahwa sampai bulan Oktober 2010 ini hanya terdapat 67 jurnalis perempuan (29,78%) dalam

Kompas. Selain itu, 7 dari 9 orang Dewan Redaksi *Kompas* juga didominasi oleh laki-laki.

Fakta di atas menyebabkan sensitivitas gender pengelola media massa yang diimplementasikan lewat kebijakan media, bisa dikatakan masih belum memadai. Persoalan perempuan yang diakibatkan oleh munculnya diskriminasi, subordinasi atau marginalisasi di tengah masyarakat, masih dihampiri secara setengah-setengah. Sebagian besar pengelola media massa masih memiliki kepercayaan dan nilai yang bias gender. Hal ini tercipta karena lingkungan internal media dan lingkungan sosial dimana pengelola media tersebut berada, masih mengukuhkan praktik dan menjadi agen dari perilaku yang bias gender. Ideologi patriarki masih kuat melekat pada para pengelola media massa.

Realita ini jelas bertolak belakang dengan gagasan normatif yang muncul dalam Undang-Undang Pers No.40/Tahun 1999 Pasal 2 tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu juga bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 1, yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Kedua undang-undang tersebut menyiratkan bahwa media dalam melakukan konstruksi pemberitaan, seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas lain.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berita politik ber-isu gender yang termasuk dalam lima tema berita politik di *Kompas*. Selain itu penelitian juga dilakukan untuk mengetahui ideologi patriarki kapitalistik yang muncul dalam konstruksi pemberitaan politik ber-isu gender di *Kompas* serta untuk mengetahui

labelisasi-labelisasi ideologi patriarki kapitalistik yang muncul terkait dengan konstruksi pemberitaan politik ber-isu gender.

Batang Tubuh

Media massa merupakan elemen penting dalam distribusi informasi terkait hak-hak perempuan dan keadilan gender. Lewat pemberitaan dan liputan tentang berbagai isu perempuan dan gender, media massa dapat mempengaruhi cara pandang para pembacanya, untuk semakin berperspektif perempuan dan sensitif gender atau, sebaliknya, semakin bias gender. Peter L. Berger dan Thomas Luckman 1966: 22) lewat teori *Social Construction of Reality* menjelaskan bahwa proses konstruksi realitas (politik) adalah upaya “menceritakan” (koseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, orang atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Bahkan karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) sedemikian rupa susunannya hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna.

Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama (Berger dan Luckman, 1967: 34-46). Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Namun, konstruksi wacana dalam media massa yang terkadang menjadi tumpuan pengharapan kaum perempuan “mengucapkan” diri, justru secara ideologis belum memihak kepentingan kaum perempuan. Perlakuan yang tidak proporsional dialami perempuan dalam pemberitaan di media. Media melalui konstruksi bahasa yang dibuat, telah menyebabkan suara perempuan terbungkam. Teoritisi komunikasi, Cherris Kramarae (Kramarae, 1981: 1-32) mengembangkan *Muted Group Theory* dengan menggabungkannya dengan hasil-

hasil penelitian tentang perempuan dan komunikasi.

Cheris Kramarae memandang pembicaraan laki-laki dan perempuan sebagai pertukaran yang tidak setara antara mereka yang mempunyai kekuasaan di masyarakat dan yang tidak. Ia meyakini bahwa kurang bisanya perempuan mengartikulasikan diri/memperjuangkan diri dibanding laki-laki di sektor publik sebab kata dalam bahasa dan norma-norma yang mereka gunakan itu telah dikendalikan laki-laki. Teori ini memandang bahwa bahasa adalah batasan budaya, dan karenanya laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Laki-laki lebih mempengaruhi bahasa sehingga menghasilkan bahasa yang bias laki-laki.

Berbagai konsekuensi yang muncul akibat dari subordinasi perempuan dalam pemberitaan politik, melahirkan arus gerakan feminisme. Feminisme berasal dari kata Latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyeteraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*) (Hubies, 1997:19). Sehingga, feminisme dikatakan sebagai basis teori dari pembebasan perempuan.

Aliran feminisme liberal secara khusus digunakan untuk menjelaskan perjuangan politik kaum perempuan yang selama ini termarginalisasi. Aliran feminis ini berdasarkan pada demokrasi liberal, atau pemikiran bahwa keadilan meliputi jaminan persamaan hak bagi semua individu. Para feminis liberal mengatakan bahwa kaum perempuan telah mengalami tekanan sebagai suatu kelompok dan bahwa mereka belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana terlihat jelas dalam kenyataan-kenyataan seperti pendapatan

rata-rata perempuan yang lebih rendah dan kurangnya kesempatan bagi mereka untuk maju dalam pilihan karir (Littlejohn, 1995: 238). Tuntutan feminis liberal dimanifestasikan dalam bentuk kesetaraan perempuan dalam hal pengambilan keputusan strategis dalam bidang politik. Melalui bidang politiklah segala kebijakan yang bersentuhan dengan masalah publik (baca: perempuan) dapat dibuat secara proporsional (Tong, 2004 : 49). Artinya, perempuan harus merubah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui partisipasinya dalam pembuatan kebijakan publik. Bahwa yang memahami kebutuhan perempuan hanyalah kaum perempuan itu sendiri.

Terkait dengan isu gender dan feminisme pada konstruksi pemberitaan politik, maka penelitian ini menggunakan paradigma *critical constructionism*. Konstruksionis kritis ini sebagian besar merupakan sintesis dari dua teori dalam sosiologi, yaitu : teori Konflik dan teori Interaksionisme Simbolik. Teori konflik sebagian besar berasal dari karya Karl Marx yang ditulis saat Revolusi Industri. Teori ini fokus pada perjuangan/pegulatan antara kaum borjuis dan proletar, dimana hubungan antara kedua kelas tersebut adalah bentuk eksploitasi. Teori konflik modern tidak hanya berkaitan dengan perjuangan antara pengusaha dan karyawan, tetapi juga dengan perjuangan antara semua kelompok-kelompok kepentingan, seperti: kaya dan miskin, putih dan hitam, pria dan wanita, dll. Teori konflik prihatin dengan banyaknya ketidaksetaraan (Heiner, 2006 : 7-9). Sedangkan teori Interaksionisme Simbolik menganggap komunitas (masyarakat) sebagai pelaku komunikasi, bukanlah komunitas yang pasif, melainkan penuh interaksi dinamis yang banyak menawarkan simbol-simbol. Individu adalah perencana aktif, orang-orang yang kreatif, inovatif, reflektif, dan bebas untuk mendefinisikan setiap situasi. Individu sebagai aktor komunikasi tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain,

tetapi ia juga menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain . (Littlejohn, 1995: 160-165).

Paradigma konstruksionis kritis juga menekankan peran kepentingan elit dalam proses konstruksi masalah. Cara masalah sosial dikonstruksi, dipertimbangkan dan disajikan kepada publik sering mencerminkan kepentingan elit-elit masyarakat daripada kepentingan orang-orang kebanyakan dan sering dengan mengorbankan orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Konstruksionisme kritis berpendapat bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat telah diselewengkan oleh hubungan kekuasaan yang terlibat di dalam proses konstruksi. Artinya konstruksi masalah sosial didistorsi relasi kuasa (Heiner, 2006 : 9-11).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pendekatan analisis framing. Analisis framing mempunyai asumsi bahwa wacana media massa mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan apa yang penting atau signifikan bagi publik dari bermacam-macam isu dan persoalan yang hadir dalam wacana public. Sementara itu, Reese (2001) menyebutkan bahwa framing ini sangat relevan untuk kajian politik, sementara para teoritis gender juga menggunakan pendekatan framing untuk mengkaji politisi perempuan dan isu-isu tentang perempuan (Sudibyo, 2001 : 220).

Objek dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai berita-berita politik ber-isu gender di *Kompas* selama tahun 2008-2009. Asumsinya adalah, pada tahun-tahun tersebut pemberitaan politik tentang perempuan pasca munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang *affirmative action* diekspos secara masif oleh *Kompas*. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis framing berdasarkan pada model Zhondang Pan dan Gerald Kosicki. Data hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk melihat struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta. Unit yang diamati antara lain: headline merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media, lead (teras berita) merupakan paragraf pembuka dari sebuah berita yang biasanya mengandung kepentingan lebih tinggi, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta. Unit yang dianalisis adalah kelengkapan berita berdasarkan 5W+1H. Tematik adalah cara wartawan menulis fakta. Unit yang dianalisis adalah detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Sedangkan retorik cara wartawan menekankan fakta. Unit yang dianalisis adalah kata, idiom (metafora), foto dan grafik.

Untuk mengevaluasi sebuah penelitian kualitatif dalam paradigma kritis, maka bisa dilihat dari kriteria *goodness* atau *quality* (Lincoln dan Guba, 2000; Sunarto, 2007 : 230). Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah pemberian konteks historis (*historical situatedness*). Melalui konteks historis, maka penelitian ini menempatkan pemberitaan politik yang terkait isu gender dalam konteks feminisme di Indonesia. Alasan utama mengapa dinamika feminisme digunakan sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini, mengacu fakta di lapangan bahwa porsi keterwakilan perempuan ditingkat Legislatif maupun Eksekutif yang posisinya pada level pengambil keputusan (*decision maker*) sangatlah kecil. Padahal keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD, dari sisi kuantitas tetap diperlukan untuk memberi harapan, kekuatan, sekaligus gerakan bagi lahirnya kebijakan dan undang-undang yang mengakomodasi kebutuhan perempuan yang tidak bisa ditanggalkan lagi kepentingannya.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan analisis framing diketahui bahwa ideologi patriarki kapitalistik menyebabkan munculnya dua

konsep framing pada lima tema berita *Kompas*. Framing maskulinitas politik muncul pada tema berita tentang sistem politik, partai politik, dan budaya politik. Sedangkan framing marjinalisasi peran politik perempuan, muncul pada tema berita tentang sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pada struktur sintaksis labelisasi yang muncul adalah hegemoni ideologi patriarki dan skeptisisme peran politik perempuan.

Terkait dengan labelisasi yang muncul, maka diketahui bahwa pada struktur skrip, labelisasi yang muncul adalah: politik belas kasihan untuk perempuan, apatisisme perempuan pada politik, hegemoni ideologi patriarki serta stereotipe pada perempuan. Struktur ketiga tentang tematik, menghasilkan labelisasi seperti: politik belas kasihan untuk perempuan, apatisisme perempuan pada politik, dan stereotipe pada perempuan. Struktur terakhir tentang retorik, mempunyai labelisasi seperti: stereotipe pada perempuan, hegemoni ideologi patriarki serta annihilisasi simbolik.

Analisis terhadap framing dan labelisasi tersebut menyiratkan kecenderungan *Kompas* menempatkan perempuan dalam lingkup peran politik yang sempit. Perempuan menjadi realitas bisu di panggung politik. Lagi-lagi, perempuan diposisikan sebagai objek kepentingan, tanpa mampu ikut andil menentukan arah kebijakan. Sementara, laki-lakilah yang berkuasa, sebagai pemegang peran mayoritas pembuat keputusan (*policy maker*).

Saran

Saran Akademis

Terbuka ruang bagi peneliti lain untuk menggunakan dua surat kabar sebagai bahan kajian sehingga mampu melakukan analisis komparatif terhadap isu sejenis. *Muted Group Theory* tidak menyediakan penjelasan yang lengkap tentang perbedaan *man-language* dengan *women-language*, sehingga diperlukan referensi lain sebagai pendukungnya.

Selain itu, teori feminisme liberal sebagai bagian dari teori gelombang pertama feminisme, bisa dipadukan dengan teori feminisme sosialis dan feminisme marxis sehingga didapat analisis yang lebih komprehensif. penggunaan analisis framing sebagai analisis data penelitian ini. Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu menjawab konteks penelitian di luar teks yang dianalisis. Oleh karenanya, peneliti merekomendasikan pada peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan analisis Discourse.

Saran Praktis

Perlunya membuat buku panduan (*guidance book*) bagi jurnalis yang berisi pemilahan kata-kata yang termasuk dalam kategori *man-language* dan *woman language*. Adanya buku panduan ini merupakan upaya untuk mengurangi bias gender dalam pemberitaan *Kompas*.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L dan Luckmann, Thomas. 1967. *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York : Anchor Books
- Heiner, Robert. 2006. *Social Problems. An Introduction to Critical Constructionism*. New York : Oxford University Press
- Hubies, Aida Fitalaya S. 1997. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam buku Membicarakan Feminisme : Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung : Pustaka
- Kramarae, Cheri. 1981. *Women and Men Speaking: Frameworks for Analysis*. London: Newbury House Publishers, Inc
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publications

- Littlejohn, Stephen W. 2002. *Theories of Human Communication*. Belmont CA: Thomson Wadsworth
- May Lan. 2002. *Pers, Negara dan Perempuan*, Yogyakarta: Kalika.
- Siregar, Ashadi. 1999. *Media dan Gender : Perspektif Gender atas Industri Surat kabar Indonesia*. Yogyakarta : LP3Y dan Ford Foundation
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS
- Sunarto. 2007. *Kekerasan Televisi Terhadap Wanita (Disertasi : Studi Strukturasi Gender Industri Televisi Dalam Naturalisasi Kekerasan Terhadap Wanita Melalui Program Televisi Untuk Anak-Anak Di Indonesia)*.